
PERAN DAN PENCAPAIAN WITNESS ORGANIZATION DALAM MENGADVOKASI HAK ASASI MANUSIA MELALUI *OUTREACH* VIDEO DI MEDIA SOSIAL TAHUN 2010-2017

Meuthia Maharani

¹International Relations Department, Social & Political Science Faculty, Muhammadiyah University of Yogyakarta, Bantul, DIY, 55183
meuthiamhrn@gmail.com

Abstract

Violations of human rights are still prevalent in various parts of the world and are often ignored. This paper discusses four cases of human rights violations, namely gender abuse in America in 2010, gender-based violence in Zimbabwe in 2014, police brutality in Brazil in 2017, and the seizure of indigenous peoples' land rights by extractive industries in Mexico in 2017. These cases then being advocated by WITNESS, a non-governmental organization that focuses on human rights issues. WITNESS, which has been established since 1992, uses their position to advocate lots of communities who are deprived of their right to stop human rights violations in various parts of the world.

Keywords: Human Rights, Advocacy, NGOs, Transnational Advocacy Network, Social Media

Abstrak

Tindak pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) masih banyak terjadi di berbagai belahan dunia, dan masih kerap kali diabaikan. Makalah ini membahas empat kasus pelanggaran HAM, yaitu kekerasan terhadap manula di Amerika tahun 2010, kekerasan berbasis gender di Zimbabwe tahun 2014, kekerasan polisi di Brazil tahun 2017, dan perebutan hak tanah milik masyarakat adat oleh industry ekstraktif di Mexico tahun 2017. Kasus-kasus ini kemudian diadvokasi oleh WITNESS, sebuah organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu hak asasi manusia. WITNESS, yang telah berdiri sejak 1992, menggunakan posisi mereka untuk mengadvokasi masyarakat yang terenggut haknya untuk menghentikan tindak pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia.

Kata kunci: HAM, Advokasi, NGO, Transnational Advocacy Network, Media Sosial

INTRODUCTION

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia, apa pun kebangsaan kita, tempat tinggal, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. Kita semua sama berhak atas hak asasi manusia kita tanpa diskriminasi. Hak-hak ini semuanya saling terkait, saling bergantung dan tak terpisahkan. Hak asasi manusia universal sering diungkapkan dan dijamin oleh hukum, dalam bentuk perjanjian, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum dan sumber-sumber hukum internasional lainnya. Hukum hak asasi manusia internasional menetapkan kewajiban Pemerintah untuk bertindak dengan cara tertentu atau untuk menahan diri dari tindakan tertentu, untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan mendasar

dari individu atau kelompok (United Nation of Human Rights). Hal ini berlaku dimana saja didalam lingkup universal. HAM membutuhkan empati dan aturan hukum, dan semua orang wajib untuk menghargai hak asasi dari orang lain.

Kekerasan atau perenggutan terhadap hak-hak manusia secara paksa disebut dengan pelanggaran HAM. Kabar baiknya, ditengah maraknya pelanggaran HAM yang terjadi, hingga hari ini isu HAM mulai menjadi perhatian banyak pihak, terutama dikalangan aktivis, organisasi, sampai pemerintah. Dari banyaknya kasus yang terjadi, muncul rasa simpati dan nilai-nilai baru yang mana pada akhirnya melahirkan *social movement* oleh organisasi non pemerintah (NGOs) diseluruh dunia. Berbagai upaya dan kampanye disuarakan, proses advokasi dan persuasi sosial mulai digerakkan. WITNESS merupakan salah satu dari NGO yang bergerak melawan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

WITNESS Organization berdiri sejak 1992 oleh seorang musisi dan aktivis, Peter Gabriel yang terinspirasi setelah melakukan tur Human Rights Now! bersama Amnesty International pada tahun 1988. Peter mulai merekam berbagai cerita yang ia dengar selama tur menggunakan *handycam*, dan memutuskan untuk mendirikan WITNESS sebagai wadah untuk menyuarakan ketidakadilan pada hak asasi. Aktivis ini meyakini, bahwa dengan mengumpulkan bukti berupa video (yang kemudian diunggah) merupakan suatu cara yang efektif untuk menarik perhatian dan meningkatkan kesadaran publik mengenai isu pelanggaran HAM. Kantor WITNESS sendiri berada di Brooklyn. WITNESS menciptakan dampak lokal dalam berkolaborasi dengan aktivis *grassroot*, jurnalis, pengacara, LSM, dan pembuat media, mereka menerapkan apa yang mereka pelajari di tingkat lokal ke lanskap yang lebih luas dari video hak asasi manusia. (Witness Organization)

WITNESS Organization mengadvokasi banyak isu mengenai HAM, terutama dalam kasus kejahatan perang, kekerasan polisi di Amerika, diskriminasi gender, perebutan hak tanah masyarakat adat oleh industri ekstraktif, hingga jaminan kemanan untuk manusia lanjut usia di Amerika Serikat. WITNESS berfokus dalam mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran

HAM dalam bentuk *footage* yang kemudian dipublikasi ataupun dibawa menjadi bukti untuk pengadilan. Ada beberapa pencapaian WITNESS, dalam skripsi ini penulis akan berfokus pada 4 isu yang diadvokasi WITNESS selama beberapa tahun terakhir, yaitu:

1. Kekerasan terhadap manula (*elder abuse*) di Amerika Serikat (2010)
2. Kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) sebagai senjata politik di Zimbabwe (2014)
3. Kekerasan polisi (*police brutality*) di Brazil (2017)
4. Perebutan hak tanah suku adat Meksiko Juba Wajin oleh industri ekstraktif (2017)

Seiring perkembangan zaman, dan permasalahan sosial yang muncul, internet kemudian menjadi salah satu alat dalam advokasi. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh banyak organisasi dan berbagai pergerakan untuk mencapai kepentingan mereka.

METHODS OF RESEARCH

This section is only for research article.

THEORETICAL FRAMEWORK

Transnational Advocacy Network

Menurut Margareth Keck dan Kathryn Sikkink merupakan *advocacy networks* karena kelompok mereka mengadvokasi dengan saling mendukung suatu perkara yang diajukan oleh aktor yang lain. Mereka juga menyatakan bahwa *transnational advocacy network* memiliki ciri khas tersendiri karena mereka terorganisasi untuk mempromosikan suatu isu, ide-ide, norma-norma, serta seringkali melibatkan individu untuk turut mengadvokasi perubahan kebijakan. (Keck & Sikkink, 1998)

RESULT AND ANALYSES (Research Articles) / ANALYSES (Opinion Articles)

Perlindungan Legal Untuk Manula di Amerika (2010)

Pelecehan terhadap manula merupakan sebuah tindakan secara sadar dan disengaja, bisa berupa kelalaian, kegagalan dalam bersikap baik kepada para manula sehingga menimbulkan ketidakpercayaan, dan menimbulkan resiko yang merugikan manula.

Kebanyakan kasus yang terjadi pada manula seperti eksploitasi finansial, kekerasan, dan pengabaian terhadap manula ini dilakukan oleh orang-orang di lingkungan terdekat, seperti dari lingkup keluarga dan dari pengasuh mereka. Beberapa kasus yang biasa terjadi adalah pengambil alihan properti, kekerasan emosional, hingga kekerasan fisik. Para manula seolah menjadi tahanan di rumahnya sendiri. Kekerasan manula sering juga disalah artikan, diabaikan banyak pihak karena dianggap hanya permasalahan keluarga biasa dan jarang sekali ditindak lanjuti secara hukum.

Pelecehan terhadap manula, pun pengabaian dan eksploitasi, dialami oleh 1 dari setiap 10 orang, dari usia 60 keatas yang tinggal di rumah. Data ini kemungkinan disepelekan karena banyak korban tidak mampu atau takut untuk mengungkapkan atau melaporkan kekerasan. Belum dapat dipastikan mengenai jumlah manula yang diperlakukan secara buruk, namun menurut data dari Elder Abuse Statistics, wanita lanjut usia justru lebih sering menjadi korban kekerasan dengan jumlah jauh diatas pria. Orang yang berusia di atas 80 tahun mendapat peluang lebih besar untuk menjadi korban dibandingkan dengan manula yang “lebih muda”. Ciri-ciri bahwa ada manula yang menjadi korban kekerasan masih sulit untuk dideteksi oleh para *caregiver* (perawat medis lansia) karena tidak adanya pelatihan terkait metode untuk mendeteksi bentuk kekerasan-kekerasan terhadap manula. Kendala selanjutnya biasanya berasal dari pihak manulayang kerap kali enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami, rasatakut akan ancaman atau ketidakmampuan fisik atau kognitif mereka untuk mengajukan laporan. (Elder Abuse Statistics, 2018).

Dalam maraknya kasus kekerasan dan pelecehan terhadap manula ini, selama satu dekade terakhir, Witness Organization menjalin kemitraan bersama sebuah koalisi National Council on Aging (NCOA), serta 17 orang advokat Hak Asasi Manula, dengan melakukan upaya advokasi melalui video. Upaya mereka membuahkan hasil; yaitu disahkannya Elder Justice Act (EJA) pada 23 Maret 2010 oleh Presiden Barrack Obama, yang mana pengesahan

legal justice atau pengaturan hukum ini akan sangat membantu dalam penyelesaian kasus-kasus yang menimpa para manula.

Witness Organization dan mitranya mengunjungi para manula di Amerika, meminta mereka untuk berbagi tentang cerita kelam mereka tentang pelecehan, kekerasan, eksploitasi dan penelantaran yang mereka alami dan mendokumentasikannya kedalam satu film dokumenter pendek yang berjudul “*An Age for Justice: Confronting Elder Abuse in America and over 100 video testimonies.*”¹ yang kemudian dikirimkan kepada kongres dengan harapan dapat meloloskan EJA agar disahkan. Dalam video tersebut memperlihatkan beberapa manula yang menceritakan kekerasan yang mereka alami, kasus yang paling sering adalah eksploitasi finansial dan pencurian data-data pribadi yang kemudian dipakai untuk berbagai kepentingan tanpa persetujuan dari pihak manula. Video tersebut ditayangkan di sebuah *briefing hill* dihadapan kongres dan para advokat di Amerika, sehingga menarik perhatian mereka untuk bergabung dan mendesak para Representatif dan Senator agar segera mengambil tindakan. (Witness, 2014)

Mengekspos Kekerasan Seksual yang Digunakan Sebagai Senjata oleh Beberapa Partai Politik di Zimbabwe (2014)

Menurut Laporan Perkembangan Dunia pada tahun 1993, kekerasan merupakan penyebab paling serius diantara kematian dan kelumpuhan perempuan di usia reproduksi. Wawasan akan penyebab dari kekerasan berbasis gender diantara laki-laki dan perempuan telah ditelusuri selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Akar paling utama dari ketidaksetaraan ini adalah patriarki, yang mana jika diartikan secara harfiah, patriarki merupakan patriarki berarti aturan oleh kepala keluarga sosial laki-laki adalah sesepuh masyarakat memiliki kekuasaan yang sah atas orang lain dalam unit sosial yang ada, terutama keluarga. (Pilcher,

¹ Film dapat dilihat di <https://youtu.be/-eaXBJ87to>

2004) Dengan kata lain patriarki didefinisikan sebagai kontrol oleh pria dan bagaimana pria memiliki kekuatan dan kontrol atas wanita. Kontrol inilah yang menjadi akar terjadinya kekerasan berbasis gender oleh pria terhadap wanita. (Mashiri, 2013)

Sejak Januari hingga Juni 2008, ada hampir 500 laporan penyerangan dan 700 kasus intimidasi politik terhadap perempuan yang dilaporkan kepada Forum NGO Zimbabwe Rape Survivor Association (RSA). RSA mengestimasi angka *state-sanctioned groups* yang melakukan tindak pemerkosaan kepada lebih dari 2000 perempuan dan anak-anak antara Mei dan Juli 2008. *Gender Based Violence* (GBV) atau kekerasan berbasis gender lahir akibat adanya kesenjangan dan ketidakseimbangan kekuasaan di antara laki-laki dan perempuan, hal ini terkait dengan anggapan perempuan sebagai objek dengan peran gender yang diberatkan kepada mereka untuk tunduk kepada laki-laki. GBV di Afrika merupakan tindakan kejam bersifat politis oleh para pemegang otoritas di negara tersebut. Kekerasan seksual sebagai senjata konflik politik adalah kekejaman yang serius dan dewasa ini mempengaruhi jutaan orang (terutama perempuan dan anak perempuan) dengan implikasi kesehatan yang serius, baik fisik maupun psikologis. (Bastick, Grimm, & Kunz, *Sexual Violence in Armed Conflict: Global Overview and Implications*, 2007) Hal ini merupakan strategi sadar yang dipakai oleh kelompok-kelompok bersenjata untuk menyiksa dan menghina lawan; menggertak individu dan menghancurkan masyarakat, terutama untuk menghasut pelarian dari suatu wilayah; dan untuk menegaskan kembali agresi dan kebrutalan, khususnya melalui ekspresi dominasi. (Bastick, *SEXUAL VIOLENCE IN ARMED CONFLICT: Global Overview and Implications*, 2007)

Parahnya lagi pelanggaran HAM seperti ini justru menjadi tren dikalangan politisi di seluruh kawasan Afrika. Penganiayaan dan intimidasi dilakukan membabi buta, terlebih pada saat masa-masa pemilu, hal ini kian terus terjadi karena tindakan ini dianggap senjata politik oleh para pelakunya. Kekerasan seksual marak dijadikan senjata politisi di Zimbabwe sejak

tahun 2000. Kejahatan ini dipakai untuk menekan perbedaan pendapat politik, mengintimidasi lawan politik dan merusak psikologis lawan. Maraknya tindak GBV di Afrika memberi dampak merugikan yang amat serius terhadap kehidupan korbannya; secara mental maupun fisik. Timbulnya rasa trauma, gangguan psikologis, kehilangan harga diri, luka dan kecacatan fisik, hingga tertular berbagai penyakit mematikan seperti HIV/AIDS, penyakit kelamin, dan lain-lain.

Pada tahun 2000, WITNESS secara resmi menjalin kemitraan bersama The Research and Advocacy Unit (RAU) dalam membuat sejumlah video advokasi yang menunjukkan kisah-kisah pilu para penyintas kekerasan fisik dan seksual di Zimbabwe, salah satunya berjudul "*Hear Us: Zimbabwean Women Affected by Political Violence*"² Pada setiap video yang dibuat, WITNESS berkerjasama dengan tim dari RAU untuk membuat *Video Action Plan*, sebuah proses yang dirancang untuk membantu para aktivis berpikir, bagaimana menjangkau target penonton mereka dan bagaimana cara menyampaikan cerita dengan paling efektif. Pembuatan video-video ini melewati proses yang tidak gampang. Kedua mitra ini berupaya cukup keras untuk membujuk dan meyakinkan para penyintas guna mendapat persetujuan, mereka juga memastikan keamanan identitas subjek demi mengurangi resiko pembalasan terhadap penyintas dan tim mereka masing-masing oleh para pelaku yang terkait. Pada awalnya proyek ini tidak banyak didukung mengingat isu kekerasan seksual adalah isu yang sensitif dan dianggap politis di negara tersebut, terbukti dengan banyaknya aktivis LSM yang dipukuli dan ditangkap karena program-program yang dianggap politis. (Witness Organization, 2014)

Video ini akhirnya diputar ke seluruh negeri melalui tur kampanye untuk meningkatkan *awareness* yang lebih luas yang diisi dengan sesi diskusi. Menurut tim dari RAU, pemutaran video jauh lebih efektif ketimbang laporan tertulis, mengingat masih banyak

² Video dapat dilihat di <https://youtu.be/L68KxQcjbIs>

sekali masyarakat yang buta huruf, video merupakan bukti nyata yang dapat semua orang saksikan. Video juga sebuah wadah bagi para penyintas GBV untuk bersuara, dan banyak dari mereka yang mengaku bahwa itu adalah pertama kalinya mereka terbuka dan berbagi peristiwa traumatis mereka. Video RAU dan WITNESS ini mampu menjangkau khalayak banyak secara online, menunjukkan kekuatan video untuk menceritakan kisah universal yang menggema di seluruh budaya, bahasa, bahkan latar belakang politik.

Kemenangan Rio Favelas Dalam Melawan Kekerasan Polisi di Brazil (2017)

Kekerasan dan pembunuhan oleh polisi di Brazil bukan lagi berita yang asing. Sejak tahun 2003, kekerasan yang dilakukan polisi Brazil bahkan tidak pernah ditindak lanjut secara hukum dan diberi hukuman. Hak impunitas yang diterapkan dalam eksekusi legal oleh polisi sayangnya justru membuat kekerasan polisi Brazil ini berlanjut menjadi hal yang umum, dan seringkali disalahgunakan.

Forum Keselamatan Publik Brazil yang berbasis di Sao Paulo melakukan sebuah studi yang menunjukkan bahwa polisi di seluruh negeri Brazil membunuh 11.197 orang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menjelang 2014, sementara agen-agen penegakan hukum di Amerika Serikat membunuh 11.090 orang dalam 30 tahun terakhir sejak 2009. Pada studi itu juga diterangkan bahwa hampir 70 persen korban pembunuhan berkulit hitam dan lebih dari setengahnya berusia 15 sampai 29 tahun (Antoine, 2014).

Pada kasus ini, polisi Brazil seringkali menggunakan kekuatan yang berlebihan, bahkan sering mengeksekusi tersangka tanpa melewati prosedur hukum terlebih dahulu dengan dalih 'perlindungan diri'. Polisi Brazil juga seringkali menutup-nutupi kasus pembunuhan yang mereka lakukan dengan merusak bukti-bukti di tempat kejadian perkara, dan mirisnya sistem kejaksaan Brazil membiarkan hal tersebut terjadi. Acapkali diadakan sidang terhadap kasus-kasus pembunuhan oleh polisi Brazil di pengadilan, namun justru membuahkan output investigasi yang buruk karena para saksi yang ketakutan akan ancaman dari polisi.

Sejak tahun 2014, WITNESS berkerjasama dengan Papo Reto, yaitu sekelompok aktivis berbasis komunitas yang menggunakan ponsel dan media sosial untuk melawan narasi *mainstream*, mendokumentasikan pelanggaran, dan melaporkan kekerasan polisi di *Complexo do Alemão*³, sekelompok 16 Favela⁴ di bagian utara Rio de Janeiro, Brazil.

WITNESS dan Papo Reto yang sedari awal meyakini betapa pentingnya video untuk mematahkan pola impunitas yang berakar ini, dengan mengandalkan keberadaan video yang seringkali menjadi satu-satunya harapan untuk kebenaran dan pertanggungjawaban dalam kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh polisi Brazil. Video merupakan bukti yang tidak dapat disangkal kevalidannya, dapat mengurangi diciptakannya narasi palsu dan membantu meningkatkan tekanan pada proses investigasi, institusi dan otoritas yang bertanggung jawab untuk memastikan keadilan. (Neri) Kolektif Papo Reto bersama WITNESS berkerjasama hingga mencapai kemenangan dalam melawan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kepolisian Brazil.

Diawali dengan kesuksesan pada bulan Agustus 2017, dimana dua komandan polisi di Kepolisian Unit (UPP) - Koordinator Unit André Luiz Belloni Gomes dan Mayor Leonardo Zuma, komandan UPP Nova Brasilia - dikecam oleh Kantor Jaksa Penuntut Umum (MP) Negara Bagian Rio de Janeiro untuk kejahatan yang dilakukan dalam invasi ilegal tempat tinggal pribadi di lingkungan Praça do Samba yang bertempat di favela Complexo do Alemão. Hukuman untuk para komandan berkisar dari 6 bulan hingga 2 tahun penjara. (Mujagic, 2017) Kasus ini dianggap kemenangan di Favela karena jarang sekali pihak dari kepolisian baik itu staff, hingga komandan yang bisa diadili untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pelanggaran HAM yang mereka lakukan terhadap

³ Complexo do Alemão adalah sebutan untuk sekelompok favela di Utara Rio de Janeiro, Brazil

⁴ Favela adalah sebuah lingkungan unik, berpenghasilan rendah dan menengah, dan tidak diatur di Brasil yang telah mengalami penelantaran pemerintah yang bersejarah

warga sipil. WITNESS bersama Papo Reto mengumpulkan video *footage*⁵ dan foto yang diperlihatkan sebagai bukti untuk menuntut polisi Brazil di pengadilan oleh Public Defender's Office of Rio de Janeiro. Pada September 2017 Witness dan Papo Reto menyelesaikan dokumen lengkap tentang dampak dari invasi ilegal ini dalam kehidupan penduduk Complexo do Alemão. Kedua organisasi ini juga menghitung kerusakan materi dari invasi dan kerusakan yang disebabkan oleh operasi polisi.

Kemenangan Suku Júba Wajínatas Hak Tanah di Pengadilan Meksiko (2017)

Pada tahun 2011 masyarakat Júba Wajín pertama kalinya mengetahui bahwa Pemerintah Bagian Guerrero memberikan izin pertambangan kepada 2 perusahaan tambang, sebanyak 80% tanah yang mencakup hak-hak masyarakat telah diberikan pemerintah tanpa ada diskusi dengan suku tersebut terlebih dahulu. Konstitusi Meksiko menjamin bahwa masyarakat akan dikomunikasikan tentang bagaimana tanah mereka dapat dikembangkan atau digunakan. Ketika masyarakat mendesak kontrak penambangan secara hukum, pemerintah Meksiko justru berusaha menepis bahwa mereka sebenarnya bukan masyarakat adat dan sehingga mereka tidak memiliki hak untuk memprotes pengaturan tersebut.

Keputusan sepihak dari pemerintah ini akhirnya memancing kekesalan masyarakat adat yang kemudian menuntut pemerintah melalui pengadilan. Witness Organization kemudian menjalin kerjasama dengan suku Júba Wajín dalam memperjuangkan hak-hak mereka melalui video. Video yang berisi bukti-bukti valid menunjukkan gaya hidup tradisional, pertanian, bahasa asli, dan adat istiadat.⁶ WITNESS juga membantu masyarakat suku ini dalam menunjukkan bagaimana pertambangan ini berdampak buruk bagi tanah dan mata pencaharian mereka.

⁵ Beberapa kumpulan footage mengenai kekerasan polisi di Brazil dapat dilihat di: <https://www.youtube.com/watch?v=tqRcuiaYWZI>, <https://www.youtube.com/watch?v=EXKnuYl8aoo>, <https://vimeo.com/76769715> (VPN required), <https://www.youtube.com/watch?v=BOPJVbksd9g>

⁶ Video dapat dilihat di <https://youtu.be/WhDnjcFkPEY>

Dalam kemenangan yang dicapai masyarakat Júba Wajiín, video tersebut merupakan bukti yang amat penting sehingga mendatangkan kemenangan pada Juli 2017. Pengadilan Federal memutuskan negara bagian Meksiko memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati hak-hak tanah adat, dan operasi penambangan tidak dapat dilanjutkan tanpa adanya persetujuan dari masyarakat.

Setelah kemenangan bersejarah ini, Kementerian Ekonomi mengajukan banding atas keputusan tersebut. Banding saat ini berada di tangan Pengadilan Sirkuit di Acapulco, ibukota negara bagian Guerrero. Untuk menyoroti pentingnya kasus ini dan memastikan bahwa Júba Wajiín menjamin keadilan, WITNESS dan Valerio Amado Mauro, Presiden Properti Komunal Júba Wajiín memutar film dokumenter tersebut di sebuah festival film yang diselenggarakan dan oleh Mahkamah Agung Meksiko. Pada pemutaran film, pengacara komunitas meminta Pengadilan untuk membawa resolusi final untuk kasus ini.

Dengan upaya kolektif ini, WITNESS membantu memastikan bahwa suara-suara Júba Wajiín didengar oleh pengadilan tertinggi Meksiko, oleh anggota parlemen, sesama warga dan aktivis *grassroots*. Hal ini juga membuka jalan bagi banyak komunitas adat lainnya yang mungkin ingin atau perlu menggunakan video guna melindungi dan mempertahankan hak-hak juga tanah mereka dari industri ekstraktif dan kepentingan pemerintah.

WITNESS dan jejaring advokasinya telah sukses mengadvokasi banyak kasus pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia dengan memberdayakan kemajuan teknologi berupa video dan media sosial sebagai alat advokasinya.

Program & Jaringan WITNESS

WITNESS telah memberi dampak positif yang luas di berbagai belahan dunia; memiliki program-program regional di kawasan Afrika-Sub Sahara, Asia-Pasifik, Amerika Latin-Karibia, Timur Tengah-Afrika Utara, dan Amerika Serikat. WITNESS menjalin kerjasama dengan 426 organisasi – termasuk komunitas-komunitas kecil *grassroot*,

melakukan pelatihan kepada 11.157 orang, mewakili 130 negara, dan sebanyak 1 juta orang pertahun mengakses sumber-sumber informasi baik *online* ataupun *offline* dari NGO ini.

Organisasi ini bergerak melalui internet, salah satunya adalah website. Laman WITNESS ini memuat kabar terbaru yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan mereka, maupun berita tentang hak asasi yang sedang terjadi. Sedangkan pada laman blog berisikan tentang *update* mengenai proyek-proyek yang sedang dikerjakan, atau telah berhasil mereka laksanakan. Lalu yang terakhir, adalah WITNESS MediaLab yang didedikasikan untuk melancarkan potensi video saksi mata sebagai alat yang ampuh untuk melaporkan, memantau, dan mengadvokasi hak asasi manusia. WITNESS Media Lab merupakan proyek dari WITNESS dan Google News Initiative.

WITNESS percaya bahwa tahap selanjutnya dari advokasi hak asasi manusia akan didukung oleh video yang dibuat dan dibagikan oleh para saksi mata. Pekerjaan mereka adalah dengan mengatasi tantangan untuk menemukan, memverifikasi, dan mengkontekstualisasikan video-video tersebut. Mereka berkerjasama dengan rekan-rekan dari bidang advokasi, teknologi, dan jurnalisme, mereka bersama-sama mengembangkan solusi untuk memastikan bahwa rekaman yang diambil oleh warga biasa dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk keadilan.

Analisis NGO WITNESS

Dalam bahasan skripsi ini, NGO WITNESS termasuk dalam mobilization NGO, dikarenakan sebagaimana yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, WITNESS bergerak memobilisasi masyarakat dalam memperjuangkan hak mereka, baik dalam isu sengketa tanah, gender, hak asasi, hingga hak manula.

Dalam hal ini, penulis melihat NGO WITNESS memiliki peran sebagai advokator juga fasilitator, karena WITNESS berfokus dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. WITNESS memposisikan peran mereka sebagai pendamping hukum namun juga memfasilitasi bantuan-bantuan berupa *emotional and intellectual support*, memberikan

pelatihan-pelatihan mengenai cara mendokumentasikan pelanggaran HAM yang baik-benar-dan aman (yang mana ini merupakan ciri dari *mobilization NGO*), mendesak dan menekan pemerintah untuk melakukan suatu pembaruan atau perbaikan regulasi guna mengembalikan hak-hak para pihak yang dirugikan, serta memberikan penjaminan keamanan dan keadilan bagi seluruh masyarakat akan suatu isu.

Konteks jarak dengan pemerintah yang dianut WITNESS adalah High Level Politics: Grassroot Mobilization. WITNESS merupakan NGO yang bersifat advokatif, dan memposisikan peran mereka pada pihak masyarakat yang tertindas atau terepresi haknya. Dapat ditelisik dari salah satu kasus yang penulis bahas pada bab 2, mengenai kemenangan masyarakat suku Juba Wajin atas hak tanah di Meksiko pada 2017 yang lalu, pada kasus ini, WITNESS membantu proses pengumpulan *video-based evidence*, kemudian menggabungkannya menjadi suatu film dokumenter yang berisi ulasan-ulasan penting serta bukti-bukti yang menunjukkan bahwa suku Juba Wajin adalah pemilik sah tanah di area sengketa tersebut. Pada kasus ini WITNESS mendampingi Juba Wajin secara hukum, dan membantu mendorong pihak pemerintah agar segera memberikan peradilan bagi suku Juba Wajin.

Contoh selanjutnya juga bisa diamati dari kasus kekerasan polisi Brazil, WITNESS juga menunjukkan keberpihakannya dengan masyarakat di Rio Favela, yang dimana itu berarti peran WITNESS sebagai advokator *grassroot mobilization* adalah analisa yang tepat menurut saya. Mereka mengadvokasi masyarakat dengan mengumpulkan bukti-bukti kekerasan aparat dalam bentuk video, karena hanya itu satu-satunya cara paling efektif yang dapat melumpuhkan hak impunitas para polisi di Brazil. Tidak hanya berguna sebagai bukti di persidangan, video-video tersebut juga diekspos ke seluruh masyarakat seluruh dunia melalui media sosial. Video-video tersebut adalah *footage* asli yang pada akhirnya menimbulkan

social pressure baik terhadap polisi, maupun kredibilitas pemerintah itu sendiri dalam menangani kasus yang dilakukan oleh aparat mereka.

Mengacu pada paradigma NGO menurut Mansour Fakhri, penulis sepakat bahwasanya WITNESS termasuk dalam NGO berparadigma Transformatoris. NGO ini terlihat agak radikal, dimana isu keterbukaan dimanfaatkan untuk mengekspos berbagai persoalan sosial, ekonomi dan politik. WITNESS mengangkat isu hak asasi manusia sebagai fokus dari pergerakannya. NGO ini kemudian memanfaatkan kemajuan teknologi dan keterbukaan dengan membuat, dan mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran HAM – yang kemudian disebarluaskan kepada publik, meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh para aktor pemegang otoritas seperti pemerintah.

Mengenai pola relasi NGO WITNESS dan pemerintah, penulis melihat bahwa bentuk relasi yang dijalin oleh NGO ini adalah *Autonomous Relation/Benign Neglect* yang mana dalam pola relasi ini pemerintah tidak melihat WITNESS sebagai ancaman besar, karena itu pemerintah membiarkan NGO ini berkerja secara independen dan mandiri. Namun walaupun begitu, mengacu dengan paradigma yang dipegang oleh WITNESS, pola relasi seperti *Containment/Sabotage/Dissolution* juga dapat terjadi sewaktu-waktu pemerintah mulai merasa terancam dengan keberadaan WITNESS dan segala macam pergerakannya. Apabila NGO dan pemerintah sudah terjebak dalam relasi ini, pemerintah bisa saja mengambil langkah tertentu untuk membatasi ruang gerak NGO atau bahkan membubarkan NGO yang dianggap melanggar ketentuan yang berlaku.

Mengingat sifat dari NGO adalah *charity*, penting bahwa pesan mereka digambarkan dengan jelas, dengan banyak menggunakan konten visual untuk memancing emosi dan membujuk audiens mereka untuk menyumbang, sukarela, atau menyebarkan kesadaran tentang isu global. Maka dari itu WITNESS menggunakan kekuatan dari internet dengan memberdayakan fasilitas blog hingga media sosial untuk mengunggah bukti-bukti pelanggaran HAM dalam konten video.

WITNESS melakukan upaya-upaya dalam menegakkan HAM di berbagai negara dengan mengimplementasikan konsep *transnational advocacy network* (TAN). Konsep ini menjelaskan strategi yang dapat dilakukan oleh suatu jaringan dalam mewujudkan tujuan mereka. Pada skripsi ini, WITNESS berupaya dengan menggunakan dua strategi yaitu, pertama, *Information politics*. Strategi tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyediakan informasi bagi masyarakat serta mendramatisir fakta melalui pernyataan-pernyataan korban dan sebagainya sehingga menarik perhatian publik.

Kedua, *symbolics politics*, dimana WITNESS menggunakan kemampuan untuk menggunakan simbol, aksi atau kejadian dengan situasi yang masuk akal atau klaim kepada pendengar yang jaraknya cukup jauh. Dalam strategi ini, WITNESS menggunakan pendekatan berupa bukti-bukti video akan suatu pelanggaran HAM, dan film dokumenter singkat berisikan klaim-klaim atas pihak yang dibela.

Dan terakhir, *Accountability politics*, yaitu strategi untuk selalu mengingatkan pemerintah agar mempertanggungjawabkan kebijakannya sesuai dengan nilai dan norma yang telah disepakati bersama. *Strategi Information politics, symbolic politics, dan Accountability politics* merupakan strategi yang ditempuh WITNESS dalam mempengaruhi aktor-aktor kuat di Meksiko, Zimbabwe, Brazil, dan Amerika Serikat untuk melakukan perubahan dalam kebijakan mereka agar lebih memperhatikan isu HAM sebagai isu yang fundamental bagi seluruh masyarakat.

CONCLUSION

Meski perjuangan mengenai hak asasi masih terus dan selalu digencarkan, berbagai kebijakan dan regulasi hukum telah diterapkan, upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak akan optimal jika tidak didukung oleh implementasi yang nyata dari semua pihak dan lapisan masyarakat di dunia.

Hak asasi merupakan isu yang selalu eksklusif dikalangan masyarakat, ini semua dikarenakan hak asasi merupakan hak dasar yang dimiliki suatu individu hingga suatu kelompok tertentu. Hak-hak yang mengikat inilah yang kemudian menjadi landasan dalam berkehidupan, sehingga apabila seseorang atau kelompok melakukan sesuatu yang mengancam atau bahkan melampaui hak mereka sendiri terhadap hak orang atau kelompok lain, baik itu secara nilai, maupun secara fisik (berbentuk wujud), hal ini sudah termasuk dalam tindak pelanggaran HAM.

Tindak pelanggaran ini kemudian dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi pemiliknya, hal itu bisa saja mengancam, melecehkan, mengeksploitasi, mematikan fungsi, merepresi, menyakiti, hingga merenggut hak yang seharusnya dikomandoi atas rasa sadar pemiliknya sendiri, yaitu semua individu. Apabila ada orang lain yang melewati batasan-batasan yang diluar haknya, maka itu sudah dapat disimpulkan sebagai pelanggaran hak asasi. Hal inilah yang kemudian membuat isu hak asasi menjadi amat luas dan tidak terhitung jenis isunya.

Angka kekerasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia masih terus meningkat, terlebih dalam era serba berkemajuan ini, berbagai kasus pelanggaran HAM justru bermuculan atas segala kemudahan sehingga terkadang masih banyak sekali orang yang memanfaatkan kemudahan-kemudahan ini sebagai jalan untuk memenangkan ego dan kepentingannya sendiri tanpa menghargai hak asasi orang lain. Namun walaupun begitu, ditengah maraknya perkembangan teknologi dan tingkat kriminalitas yang tinggi inilah yang semakin mendorong orang-orang berhati nurani untuk membentuk suatu kelompok yang menjunjung tinggi *value* dan moralitas. Mereka inilah yang kemudian berkerja keras memperjuangkan hak asasi dan membantu masyarakat kecil yang diusik haknya. WITNESS organization merupakan salah satu dari banyak kelompok tersebut. WITNESS bergerak baik secara online maupun offline. Mereka membantu masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM dengan mengumpulkan berbagai *video based evidence* yang kemudian

diekspos ke media sosial untuk mengundang atensi publik juga memancing kemitraan transnasional untuk berkerjasama, dengan intensi dapat mendesak dan menekan para pelaku pelanggaran HAM, serta pemerintah yang terkait.

Dari banyak kasus yang ditangani oleh WITNESS, penulis mengambil 5 sampel kasus yang telah sukses diadvokasi mereka dari tahun 2010 sampai tahun 2017. Kelima dari kasus yang penulis bahas merupakan 4 jenis isu hak asasi yang berbeda yaitu mengenai gender, penjaminan hak manusia lanjut usia, sengketa tanah, dan kekerasan polisi.

WITNESS tidak hanya berperan sebagai advokator, namun juga sebagai sarana pengembangan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan program-program regional yang dikerjakan WITNESS, yaitu berupa kampanye, pengadaan pelatihan tentang tata cara memfilmkan tindak pelanggaran HAM secara baik, benar, dan aman, dan juga seminar-seminar *empowerment* untuk masyarakat.

Walaupun angka kekerasan dan pelanggaran HAM masih terhitung tinggi setiap tahunnya, namun keberadaan NGO WITNESS telah memberikan dampak positif karena secara tidak langsung program-program bantuan yang mereka jalankan dapat meringankan beban kehidupan masyarakat untuk meraih keadilan dan hak-hak dasar mereka.

REFERENCES

- (n.d.). Retrieved November 11, 2018, from United Nation of Human Rights: <https://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx>
- (n.d.). Retrieved December 1, 2018, from Witness Organization: <https://witness.org/our-work/regional-programs/>
- (n.d.). Retrieved May 31, 2019, from TRIAL International: <https://trialinternational.org/what-we-do/>
- "DRC: Interview with rebel general Laurent Nkunda". (2006, September 2). Retrieved February 2019, 28, from IRIN: <http://www.irinnews.org>
- (2014, July). Retrieved May 25, 2019, from Witness Organization: <https://witness.org/success-exposing-violence-zimbabwe/>
- Andreas Kaplan, M. H. (2010). *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*. Business Horizons.
- Antoine, N. (2014, November 12). *VOA Indonesia*. Retrieved December 2, 2018, from Studi: Polisi Brazil Bunuh Sekitar 6 Orang Per Hari: <https://www.voaindonesia.com/a/studi-polisi-brazil-bunuh-sekitar-6-orang-per-hari/2516764.html>
- Asteria. (2015). *Yaman Saudara Arab Terabaikan*. Retrieved from INILAH: <https://m.inilah.com/news/detail/1434972/yaman-saudara-arab-yang-terabaikan>,
- Azzam, A. (2018, November 22). *Utusan PBB untuk Yaman datang kelompok Houthi*. Retrieved from Anadolu Agency: <https://www.aa.com.tr/id/dunia/utusan-pbb-untuk-yaman-datangi-kelompok-houthi-/1318088>
- Bastick, M. (2007). *SEXUAL VIOLENCE IN ARMED CONFLICT: Global Overview and Implications*. Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces.
- Bastick, M., Grimm, K., & Kunz, R. (2007). *Sexual Violence in Armed Conflict: Global Overview and Implications*. Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces.
- Bastick, M., Grimm, K., & Kunz, R. (2007). *Sexual Violence in Armed Conflict: Global Overview and Implications*. Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces.
- Creswell, J. W. (1993). *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach*. London: Sage.
- Darmojo. (2002). *Buku Ajar Geriatri*. Jakarta: Balai Penerbit FK UI.
- Elder Abuse Statistics*. (2018, December 20). Retrieved May 7, 2019, from Nursing Home Abuse Center: <https://www.nursinghomeabusecenter.com/elder-abuse/statistics/>
- Elridge, P. (2008). Development, democracy and non-government organizations in Indonesia. *Asian Journal of Political Science* .

- Engel, S. (2018, Desember 7). *Perundingan untuk Akhiri Perang Yaman Dimulai di Swedia*. Retrieved from Mata Politik: <https://www.matamatapolitik.com/perundingan-untuk-akhiri-perang-yaman-dimulai-di-swedia/>
- Fakih, M. (2010). *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial, Pergolakan LSM di Indonesia*. INSISTPress.
- Fathimah, I. (2018). *85.000 Anak Mati Kelaparan Akibat Konflik Yaman*. Retrieved from Kabar 24: <https://kabar24.bisnis.com/read/20181122/19/862146/85.000-anak-mati-kelaparan-akibat-konflik-yaman>
- Guidero, A., & Hallward, M. C. (2019). *Global Responses to Conflict and Crisis in Syria and Yemen*. London: Palgrave Macmillan.
- Hasibuan, M. U. (2008). *Revolusi Politik Kaum Muda*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Huwais, M. (2018). *Krisis Yaman: Separuh Warga Yaman Menghadapi Kondisi Pra Kelaparan*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45974151>
- Jakti, G. P. (2015). *Upaya Pemerintah Ali Abdullah Saleh Menyelesaikan Konflik dengan Pemberontak al-Houthi*. Jember: Universitas Jember.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Cornell University Press.
- Lima, M. (2015, November 10). *No Charges Against Rio Police in Fatal Shooting of 10-Year-Old Boy*. Retrieved April 1, 2019, from New York Times: <https://www.nytimes.com/2015/11/11/world/americas/no-charges-against-rio-police-in-fatal-shooting-of-10-year-old-boy.html>
- Mashiri, L. (2013). Conceptualisation of Gender Based Violence in Zimbabwe. *International Journal of Humanities and Social Science* , 94.
- Mata Politik. (2018, Agustus 8). *Kecam Iran, Amerika Justru Berkontribusi atas Terorisme di Timur Tengah*. Retrieved from Mata Politik: <https://www.matamatapolitik.com/kecam-iran-amerika-justru-berkontribusi-atas-terorisme-di-timur-tengah/>
- Miesel, R. (2014). *Teori Pergerakan Sosial*. Yogyakarta: Resist Book.
- Mujagic, D. (2017, September). *Police Violence*. Retrieved May 1, 2019, from Witness: <https://blog.witness.org/2017/08/rios-favelas-score-victory-military-police-abuses/>
- Neri, P. (n.d.). *Witness Media Lab*. Retrieved April 1, 2019, from Witness Organization: <https://lab.witness.org/dispatch-from-brazil-if-killed-by-police-guilty-by-default-unless-theres-video/>
- Nickel, J. (2014). *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Retrieved November 11, 2018, from <https://plato.stanford.edu/entries/rights-human/>

- Pars Today. (2018, Desember 4). *Ketika PBB Seru Hentikan Perang di Yaman*. Retrieved from Pars Today: http://parstoday.com/id/news/middle_east-i64986-ketika_pbb_seru_hentikan_perang_di_yaman
- (2004). In J. Pilcher, *50 Key concepts in Gender Studies* (p. 93). London: Sage Publications.
- Serebrov, S. (2017). *Yemen Crisis: Causes, Threats and Resolution Scenarios*. Moskow: Russian International Affairs Council.
- Sharp, J. M. (2018). *Yemen: Civil War and Regional Intervention*. Washington D.C.: Congressional Research Service.
- Singh, R. (2001). *Social Movements, Old and New; a Post-Modernist Critique*. New Delhi: Sage Publications.
- Suryokusumo, S. (1987). *Organisasi Internasional*. Jakarta: UI Press.
- Tanjung Pura Times. (2016, Mei 5). *Tiga Hari Ditangguhkan, Dialog PBB Soal Yaman Kembali Digelar*. Retrieved from Tanjung Pura Times: <http://thetanjungpuratimes.com/2016/05/05/tiga-hari-ditangguhkan-dialog-pbb-soal-yaman-kembali-digelar/>
- Trial. (2018, September 13). *Opening Of A Trial For Crimes Against Humanity And War Crimes In South Kivu*. Retrieved December 2, 2018, from TRIAL International: <https://trialinternational.org/latest-post/opening-of-a-trial-for-crimes-against-humanity-and-war-crimes-in-south-kivu/>
- UNDP. (2010, December 7). *Violence Against Women : Missing Millennium Development Goal*. Retrieved June 24, 2019, from Scoop World: <http://www.scoop.co.nz/stories/WO1012/S00211/violence-against-women-missing-millennium-development-goal.htm>
- Violence Prevention*. (2019, May 28). Retrieved June 24, 2019, from Centers for Disease Control and Prevention: <https://www.cdc.gov/violenceprevention/elderabuse/definitions.html>
- Widodo, R. F. (2019). *Peran Amnesty International Dalam Merespon Kebijakan Pencari Suaka Pemerintah Australia*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMY.
- Witness. (2014, July). *LEGAL PROTECTION FOR ELDERLY AMERICANS*. Retrieved May 15, 2019, from Witness Organization: <https://witness.org/legal-protection-elderly-americans/>
- Witness Regional Program*. (n.d.). Retrieved June 14, 2019, from Witness Organization: <https://witness.org/our-work/regional-programs/>